



LAPORAN TAHUNAN

**Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan**



**BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan untuk perbaikan pelaksanaan dan penyempurnaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan dari seluruh pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, Desember 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



Rahmi Laila, S.Si, M.Si
NIP. 198101192006042003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	Pendahuluan..... 1
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Dasar Hukum 2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 3
1.4	Hasil Kegiatan..... 3
1.5	Lingkup Kegiatan..... 4
1.6	Sistematika Penulisan 4
BAB II	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan..... 5
2.1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025..... 5
2.2	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Sumbar Tahun 2025-2045..... 66
2.4	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 84
BAB III	Penutup88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada UU tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan daerah.

Guna mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan di sektor infrastruktur maka dilaksanakan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPKD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis, kebutuhan infrastruktur dan pendanaan sesuai kewenangan pemerintah Daerah, serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur antar OPD serta dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya koordinasi, kegiatan di daerah tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Program kegiatan di daerah akan mendapat dukungan dari provinsi apabila adanya kesamaan tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Demikian juga halnya dengan pemerintah pusat, akan memberi dukungan terhadap kegiatan yang sama yang berjalan ditingkat provinsi.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut

diperlukan penyusunan dokumen perencanaan yang matang dan akurat dengan memperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis untuk mendukung proses perencanaan serta diperlukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang kewilayahan antar Perangkat Daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota. Agar alokasi anggaran difokuskan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian target RPJMD dan target Program Unggulan Kepala Daerah. Melalui sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan menjadi kendali agar masing-masing Perangkat Daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki kesamaan tujuan.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2010 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79)
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- 10) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- 11) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- 12) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-420-2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor: 903-957-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negera Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah

Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- 13) Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 020/05/I/Set/Bappeda-2024 tanggal Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 14) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2024, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

1.3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai sarana informasi dan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan tahapan dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan;
2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan pembangunan pengembangan wilayah dalam mendukung ketersediaan data, informasi dan kebijakan untuk menunjang perencanaan pembangunan lingkup kewilayahan;
3. Mewujudkan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang kewilayahan antar Perangkat Daerah dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.4. Hasil Kegiatan

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang kewilayahan sesuai dengan tahapan dan mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang kewilayahan;
3. Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang kewilayahan antar Perangkat Daerah dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

1.5. Lingkup Kegiatan

Lingkup wilayah Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi lingkup bidang kewilayahan.
2. Melakukan pengumpulan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan lingkup bidang kewilayahan.
3. Melaksanakan koordinasi lingkup bidang kewilayahan dengan OPD dan Kabupaten/Kota.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga lingkup Bidang Kewilayahan.

1.6. Sistematika Penulisan

- BAB I Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan dan ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan.
- BAB II Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan**, berisi mengenai uraian ringkas hasil pelaksanaan sub kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat.
- BAB III Penutup**, penutup berupa kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN

Dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Provinsi Barat dan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Bidang kewilayahan, maka telah dilaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian/Lembaga, OPD Teknis terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa kegiatan yang telah dikoordinasikan/difasilitasi antara lain:

2.1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 merupakan penjabaran secara lebih operasional terhadap Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dan juga hasil penyelerasan dengan Prioritas Nasional, dengan titik berat pada penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan mengacu sepenuhnya untuk menjawab tuntutan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Daerah dalam melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selain hal tersebut, pembangunan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas terhadap capaian indikator makro pembangunan antara lain yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan gini ratio, penurunan tingkat pengangguran.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan agenda RPJPN Tahun 2025-2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka sebagai bagian dari pencapaian Pembangunan nasional, dokumen RKPD Tahun 2025 juga diarahkan serta difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap berada pada tren positif dan memastikan upaya pencapaian pembangunan dapat tetap berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai dengan tepat waktu.

Namun demikian, menyikapi perkembangan proses penyusunan perencanaan di tingkat nasional yang pada saat penyusunan RKPD Tahun 2025 juga sedang dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 maka tentunya RKPD Tahun 2025 juga akan diwarnai dengan beberapa isu dan kebijakan baru di daerah sebagai bentuk keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Adapun prioritas pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2025 yakni :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3. Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital
5. Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata
6. Prioritas Pembangunan 6 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan
7. Prioritas Pembangunan 7 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan kewilayahan pada Tahun 2025 difokuskan pada:

8. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
10. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
11. Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
13. Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan kerusakan lingkungan hidup
14. Percepatan capaian sanitasi layak
15. Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luasan kawasan kumuh
16. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Untuk mendukung koordinasi dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam bentuk

rapat-rapat koordinasi seperti Forum Perangkat Daerah lingkup bidang kewilayahan.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastwil melaksanakan forum dengan mengundang Bappeda Provinsi, SKPD terkait lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil Forum Perangkat Daerah menjadi masukan bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Renja, dan nanti menjadi masukan bagi penyusunan RKPD.

Perangkat Daerah di Lingkup bidang Kewilayahan yang melakukan kegiatan Forum Perangkat Daerah adalah Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Dinas ESDM dan BPBD.



Selain kegiatan Forum Perangkat Daerah, Bidang Kewilayahan juga melakukan verifikasi terhadap Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang akan di tampung dalam RAPBD TA 2025. Dari seluruh usulan yang disampaikan melalui aplikasi SIPD, telah dilakukan verifikasi dengan hasil sebagai berikut:

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN
82	07-02-2024	ARTATI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN PERKIM LINGKAR BATEH TINGGI JORONG PILADANG NAGARI AMPEK KOTO, KEC. PALEMBAYAN, KAB. AGAM, Provinsi Sumatera Barat	BATEH TINGGI JORONG PILADANG NAGARI AMPEK KOTO, KEC. PALEMBAYAN, KAB. AGAM, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
87	07-02-2024	ARTATI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PERMOHONAN BANTUAN PELEBARAN JALAN DAN PENGECORAN JALAN PERHUBUNGAN DARI JRG SAWAH RANG SALAYAN MENUJU JORONG PABATUNGAN, NAGARI LAWANG, KEC. MATUR, KAB. AGAM	NAGARI LAWANG, KECAMATAN MATUR, KABUPATEN AGAM, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

96	28-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Jalan mda tikalak	Tanjung beringin, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi Setwan
97	28-02-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Jalan Pemukiman Lingkar Simpang Ompek_Cania go Jorong Simpang Goduang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	Jorong Simpang Goduang Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
98	28-02-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Jalan Lingkuang Garegeh Lapangan Bola Jorong Kampuang Patai, Nagari Pandam Gadang Kec Gunuang Omeh	Jorong Kampuang Patai, Nagari Pandam Gadang Kec Gunuang Omeh, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

106	28-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	drainase belakang adi karya	nagari pauh kecamatan lubuk sikaping, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi Setwan
108	28-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	drainase mda tikalak	tanjung beringin lubuk sikaping, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi Setwan
109	28-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	pengecoran jalan kapalo koto	nagari durian tinggi kecamatan lubuk sikaping, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

120	29-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	pengecoran jalan langgam saiyo	kinali, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
122	29-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	pengecoran jalan lingkung sungai lolo	mapat tunggu selatan, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
128	29-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan DRAINASE Losuang kociak	Losuang kociak Jorong Il Lubuak Layang Nagari Lubuak Layang kecamatan rao selatan, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

130	29-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Drainase Jorong III Padang Nunang	Jorong III Padang Nunang Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao selatan, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
131	29-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pemasangan paving block Jalan lingkaran kotonopan setia - sungai manis	Jorong kotonopan setia Nagari Lansek kadok Barat kecamatan Rao Selatan, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
132	29-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pemasangan paving Block Jalan lingkung kotonopan setia utara	Jorong kotonopan setia Nagari Lansek kadok Barat kecamatan rao selatan, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

136	29-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembukaan Jalan Perkampungan Sorik Baru	Jorong sorik Nagari Taruang - Taruang kecamatan rao, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
137	29-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pengecoran Jalan Padang Nunang - tanjung Air	Jorong III Padang Nunang Nagari Lubuak Layang kecamatan rao selatan, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
138	29-02-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pemasangan paving Block sumpadang	Jorong Sumpadang Nagari Padang Mentinggi kecamatan rao , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

139	01-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	DRAINASE PERMUKIMAN DI JORONG BANJA RANAH NAGARI PANGKALAN, Provinsi Sumatera Barat	JORONG BANJA RANAH NAGARI PANGKALAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
141	01-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN JORONG KOTO LAMO NAGARI GUNUNG MELINTANG	JORONG KOTO LAMO NAGARI GUNUNG MELINTANG KEC. PANGKALAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
142	01-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN JORONG TANJUNG MONTI NAGARI SUNGAI BERINGIN	JORONG TANJUNG MONTI NAGARI SUNGAI BERINGIN KEC. PAYAKUMBUH, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

143	02-03-2024	SUHARJONO	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pemasangan paving block jalan gang sukadamai dua	Sukadamai jorong bahagia nagari panti utara kecamatan panti, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
149	06-03-2024	ISMET AMZIS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENGECORAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PENGEDAMAN	KOTA BUKITTINGGI, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
150	06-03-2024	ISMET AMZIS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENGECORAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PENGEDAMAN	KAB AGAM, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

173	14-03-2024	SUPARDI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Drainase Jn.Singa Harau	Jl.Singa Harau Kelurahan Balai Panjang , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
174	14-03-2024	SUPARDI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Drainase Jl.Gajah Mada	Jl.Gajah Mada Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan Koyo Baru Payobasuang , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
175	14-03-2024	SUPARDI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Drainase Jl.M.Yamin	Jl. M. Yamin Kelurahan Padang Tengah Payobada dan Balai Jariang Air Tabit , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

210	18-03-2024	NURFIRMANWAN SYAH	Pembangunan jalan baru kewenangan Provinsi pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (Progul)	Jalan Lingkungan, Perkim 5 paket	Dapil 7 Sumbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIM AN DAN PERTANAH AN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
219	18-03-2024	MUCHLIS YUSUF ABIT	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN RABAT BETON KAMP. KY LURUS NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI	KAMP. KY LURUS NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIM AN DAN PERTANAH AN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
220	18-03-2024	MUCHLIS YUSUF ABIT	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN RABAT BETON DI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI	NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIM AN DAN PERTANAH AN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

227	18-03-2024	MUCHLIS YUSUF ABIT	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON DI NAGARI AIR HAJI TENGGARA	NAGARI AIR HAJI TENGGARA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
232	18-03-2024	MUCHLIS YUSUF ABIT	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	BANTUAN SALURAN AIR BERSIH DI KAMP RIMBO KALAM NAGARI AIR HAJI KEC.LISBA	KAMP RIMBO KALAM NAGARI AIR HAJI KEC.LISBA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Dikembalikan	Sudah divalidasi oleh Setwan
233	18-03-2024	MUCHLIS YUSUF ABIT	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	BANTUAN SALURAN AIR BERSIH DI NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI KAB.PESSEL	NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI KAB.PESSEL, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Dikembalikan	Sudah divalidasi oleh Setwan
234	18-03-2024	MUCHLIS YUSUF ABIT	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang	BANTUAN JALAN PEMUKIMAN DI NAGARI PALANGAI KACIAK KEC RANAH	NAGARI PALANGAI KACIAK KEC RANAH PESISIR KAB.PESSEL, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Fungsi Permukiman (RPJMD)	PESISIR KAB.PESSEL			AN		
241	18-03-2024	MUHLIS YUSUF ABIT	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	BANTUAN JALAN RABAT BETON DI NAGARI AIR HAJI BARAT	NAGARI AIR HAJI BARAT PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
253	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Betonisasi Jalan bayangkara Gang Anggrek RT.003 RW.13 Kelu. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah	alan bayangkara Gang Anggrek RT.003 RW.13 Kelu. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
255	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	betonisasi jalan Sunter Rt.01 Rw.03 Kel. Bungo Pasang kec. Koto Tengah	jalan Sunter Rt.01 Rw.03 Kel. Bungo Pasang kec. Koto Tengah, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			(RPJMD)						
256	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Betonisasi Jalan Gang Setapak Rt.01 Rw.03 Ke. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah	Jalan Gang Setapak Rt.01 Rw.03 Ke. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
258	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembukaan jalan Baru dan pengerasan Jalan Rw 13 kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang	Jalan Rw 13 kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
259	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Betonisasi dan Drainase jalan RT 02 dan Rt 03 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah	jalan RT 02 dan Rt 03 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

260	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pengerasan jalan Perumahan Permata Balai gadang 3 Simpang Maut Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah , Provinsi Sumatera Barat	jalan Perumahan Permata Balai gadang 3 Simpang Maut Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
271	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Jalan Lingkung RW 08 Tanah Sirah Piai Kota Padang	Jalan Lingkung RW 08 Tanah Sirah Piai Kota Padang , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
272	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	betonisasi jalan RT002 RW007 jl Kalumpang bandar Buat Kota padang	jalan RT002 RW007 jl Kalumpang bandar Buat Kota padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

273	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drainase Rt06 RW02 Kelurahan Koto Lua Pauh Kota Padang	Rt06 RW02 Kelurahan Koto Lua Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
274	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Betonisasi jalan sawah kasiak lolo gunung sarik RT 03 RW01 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang	jalan kasiak lolo gunung sarik RT 03 RW01 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
276	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Betonisasi Jalan KP Jua RT 01 RW 04 Kelurahan Batuang Taba Kec, Lubuk Begalung Kota Padang	Jalan KP Jua RT 01 RW 04 Kelurahan Batuang Taba Kec, Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
277	19-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang	Betonisasi Jalan Utama RT06 RW05 Kel.Batuang taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung	Jalan Utama RT06 RW05 Kel.Batuang taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Fungsi Permukiman (RPJMD)	Kota Padang	Sumatera Barat		AN		
347	19-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung	Kp Selamat, Jr Air Hangat, Nagari Tj Betung Utara, Kec Rao Selatan, Kab Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
348	19-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung	Kp Pancahan, Nagari Tarung Tarung Selatan, Kec Rao, Kab Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
367	20-03-2024	SAWAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	DRAINASE JALAN LINGKUNG RIMBO CANDUANG, NAGARI LINGKUANG AUA KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT	NAGARI LINGKUANG AUA KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

368	20-03-2024	SAWAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	DRAINASE JALAN LINGKUNG JAMBAK, NAGARI LINGKUANG AUA KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT	NAGARI LINGKUANG AUA KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
370	20-03-2024	SAWAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN MCK PASAR BARU BINJAI KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN	BINJAI KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
371	20-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drainase Sawah laing RT 04 Rw 01 Kel. Sei Sapih Kecamatan Kuranji kota Padang	Sawah laing RT 04 Rw 01 Kel. Sei Sapih Kecamatan Kuranji kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

372	20-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drainase Lapau Manggis RT 01 Rw 04 Kel. Gunung Sarik	Jl. Lapau Manggis RT 01 Rw 04 Kel. Gunung Sarik , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
373	20-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Betonisasi Jalan Lingkung Sungai Sapih Rt 01 RW 4 Kel.Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang	Jl. Sungai Sapih Rt 01 RW 4 Kel.Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
375	20-03-2024	LAZUARDI ERMAN	Pembangunan jalan Provinsi baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (Progul)	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG	KAB. AGAM, Provinsi Sumatera Barat	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
381	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	Jorong VIII Tingkarang, Nagari Tarung Selatan, Kec Rao, Kab Pasaman	Jorong VIII Tingkarang, Nagari Tarung Tarung Selatan, Kec Rao, Kab Pasaman , Provinsi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)		Sumatera Barat		AN		
382	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung	Kp Petani, Nagari Tarung Tarung, Kec Rao, Kab Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
383	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung	Kp Sukamulia, Jr Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kec Pd Gelugur, Kab Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
384	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung	Nagari Simpang Tonang Utara, Kec Dua Koto, Kab Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
385	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana,	Pembangunan Jalan	Kp Padang Panjang, Simpang	DINAS PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Lingkung	Tonang, Kec Dua Koto, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	N RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
386	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Kp Gunung Tua - Janji Nauli, Nagari Sitombol, Kec Pd Gelugur, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
387	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Kp Padang Panjang, Simpang Tonang, Kec Dua Koto, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

388	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Nagari Lansek Kadok, Kec Rao Selatan, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
389	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Kp Sopan Saiyo, Nagari Lansek kadok Barat, Kec Rao Selatan, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
390	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Kp Sontang - Napolan, Nagari Sontang Cubadak, Kec Padang Gelugur, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

391	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Kp Sawah Tinggi - Kp Sumur, Nagari Sitombol, Kec Pd Gelugur, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
392	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Kp Simatorkis, Nagari Tj Betung Utara, Kec Rao Selatan, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
393	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Kp Muaratolang-Sim pang tigo, Nagari Lansekkadok Barat, Kec Rao Selatan, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
394	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	Pembanguna n Jalan Lingkung Gang Bahagia, Pasar Inpres, Jorong	Gang Bahagia, Pasar Inpres, Jorong Sentosa. , Provinsi Sumatera Barat , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)	Sentosa.			AN		
395	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Katimahar-Purba Tua, Jorong Selamat Selatan., Provinsi Sumatera Barat , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
396	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kec Panti, Kabupaten Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
397	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kab Pasaman, , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
398	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Pembanguna n Jalan Lingkung	Kp Lubuk Torop, Nagari Bahagia Pd Gelugur, Kec Padang Gelugur,	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)		Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
399	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung	Jorong Rumbai, Nagari Muaratais, Kec Mapattunggul, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
400	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drainase	Jorong Rambah, Nagari Langsek Kadok, Provinsi Sumatera Barat , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
401	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drainase	Kp Muara Bangun, Nagari Sitombol, Kec Padang Gelugur, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

402	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drainase	Kp Buah Keras, Jr Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kec Padang Gelugur, Kab Pasaman. Sumatera Barat , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
403	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drainase	Kp Padang Sarai, Nagari Aia Mangguh Barat, Kec Lubuk Sikaping, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
404	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drainase	Kp Benai, Nagari Muaratais, Kec Mapattunggul, Kab Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
405	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	Pembangunan MCK	Labuhan Jurung, Nagari Panti Timur, Kec Panti, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)				AN		
406	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n MCK	Kp Muara Gondang, Jr Rambahan Selatan, Nagari Tanjung Betung Timur, Kec Rao Selatan, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
407	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n MCK	Kp Sontang Lama, Nagari Sontang Cubadak, Kec Padang Gelugur, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
408	20-03-2024	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Sumur Bor untuk sarana air bersih permukiman penduduk	di Kanagarian Cubadak Barat, Kec Dua Koto, Kab Pasaman , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
456	21-03-2024	MARIO SYAHJOHAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Betonisasi Jalang Lingkungan Permukiman	SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	(Solok Selatan)		PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
457	21-03-2024	MARIO SYAHJOHAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Drainase (Solok Selatan)	SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
458	21-03-2024	MARIO SYAHJOHAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan MCK di Solok Selatan)	SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
477	25-03-2024	ALBERT HENDRA LUKMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Betonisasi Jl Tampak Pincuran Tujuh RT 03 RW 05 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang	Jl Tampak Pincuran Tujuh RT 03 RW 05 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

501	25-03-2024	SYAFRIL HUDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	RABAT BETON BAHU JALAN SIMPANG JAGUANG MENUJU JORONG UJUNG LABUANG KEC. TANJUANG MUTIARA KAB. AGAM	JALAN SIMPANG JAGUANG MENUJU JORONG UJUNG LABUANG KEC. TANJUANG MUTIARA KAB. AGAM, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
504	25-03-2024	SYAFRIL HUDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	RABAT BATU KALI LUBUAK GADANG JORONG UJUANG LABUANG NAGARI TIKU LIMO JORONG KAB. AGAM	LUBUAK GADANG JORONG UJUANG LABUANG NAGARI TIKU LIMO JORONG KAB. AGAM, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
508	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pengedaman dan Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Permukiman Dusun Tabek Desa Bukik Gadang Kota Sawahlunto	Dusun Tabek Desa Bukik Gadang , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

510	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Permukiman Ruas Jalan Patopang Mandaliko Dusun Sago Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	Dusun Sago Desa Talawi Mudik, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
511	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Kelanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Jorong Taratak 8 Sampai Muaro Batu Tajam Nagari Atar Kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar	Jorong Taratak 8 Sampai Muaro Batu Tajam Nagari Atar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
512	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Drainase dan Penedahan Permukiman Dusun Kundi Jalan Lubuk Simaung Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota	Dusun Kundi Jalan Lubuk Simaung Desa Talawi Mudik, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

				Sawahlunto					
513	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Kelanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Guguk Panjang Jorong Andaleh Batu Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar	Jorong Andaleh Batu Bukik , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
514	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Rigit Beton Jalan Guguk Panjang Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar	Nagari Andaleh Baruh Bukik, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
515	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Rigit Beton Jalan Banjar Baliak Nagari Andaleh Baruh Bukik Kec. Sungayang Kabupaten Tanah Datar	Jalan Banjar Baliak, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			(RPJMD)						
516	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Rigit Beton Jalan Banjar Kulano Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kab. Tanah Datar	Jalan Banjar Kulano , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
517	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembukaan Jalan Lingkar Bukit Godang Untuk Perluasan Permukiman Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar	Bukit Godang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Dikembalikan	Sudah divalidasi oleh setwan
518	25-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Drainase Kiri Kanan Jalan Jorong Andaleh - Jorong Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan	Jorong Andaleh - Jorong Bukik , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			(RPJMD)	Sungayang Kabupaten Tanah Datar					
529	25-03-2024	NURFIRMANWAN SYAH	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Jalan Lingkungan, Perkim 5 paket	Dapil 7 Sumbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
532	25-03-2024	NURFIRMANWAN SYAH	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Jalan Lingkungan jalan rumah hitam Rt01rw06 kelurahan tanah garam kota solok	Jalan Lingkungan jalan rumah hitam Rt01rw06 kelurahan tanah garam kota solok, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan
542	25-03-2024	NURFIRMANWAN SYAH	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	pembangunan Jalan Lingkungan rumah hitam Rt01 rw06 kelurahan tanah garam kota solok, Payo lebar jalan 2,5 m panjang 200	Rt01 rw06 kelurahan tanah garam kota solok , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

				m alamat,					
545	25-03-2024	SAWAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	LANJUTAN PEMBUKAAAN JALAN KAMPUNG MALAYU PADANG SAWAH - PROYEK NAGARI BINJAI KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN	JALAN KAMPUNG MALAYU PADANG SAWAH - PROYEK NAGARI BINJAI KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Dikembalikan	Sudah divalidasi oleh setwan
567	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung Sikabau, Nagari Ranah Koto Tinggi Koto Balingka Pasbar	Sikabau, Nagari Ranah Koto Tinggi Koto Balingka Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
568	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkung Kampung Melayu Ranah Batahan Pasbar	Kampung Melayu Ranah Batahan Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			(RPJMD)						
570	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung Belakang telkom Air Bangis Kec Sungai Beremas Pasbar	Belakang telkom Air Bangis Kec Sungai Beremas Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
571	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drenase Silaping, Nagri Batahan Kec Ranah batahan pasbar	Silaping, Nagri Batahan Kec Ranah batahan pasbar , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
575	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung Trans Gunung Malintang sungai Aur Pasbar	Trans Gunung Malintang sungai Aur Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

580	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drenase Kampung Duren Desa Baru Kec Ranah Batahan Pasbar	Desa Baru Kec Ranah Batahan Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
582	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung Banjar Jaya Nagari Desa Baru Barat Pasbar	Nagari Desa Baru Barat Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
585	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drenase Lubuk Landuo Aur Kuning Kec Pasaman Pasbar	Aur Kuning Kec Pasaman Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
593	26-03-2024	MESRA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	BETONISASI JALAN DI KEC. X KOTO	KEC. X KOTO KAB. TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)				AN		
594	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drenase Lembah Binuang Kec Pasaman	Binuang Kec Pasaman Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
595	26-03-2024	MESRA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	DREINASE DI KEC. X KOTO	KEC. X KOTO KAB. TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
598	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Lingkung Rt 04 ophir Nagari Ophir Luhak Nanduo Pasbar	Rt 04 ophir Nagari Ophir Luhak Nanduo Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
599	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Drenase Jambak Selatan Kec Luhak nanduo	Kec Luhak nanduo Pasbar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pasbar		DAN PERTANAHAN	AN DAN PERTANAH AN		
600	26-03-2024	SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Drenase Suak Nagari Air Bangis Pasbar	Nagari Air Bangis Pasbar , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
637	26-03-2024	TAUFIK SYAHRIAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembangunan Jalan Linkar Menuju Permukiman Masyarakat Ruas Jalan Dari Seberang Jembatan Kantor Desa Talawi Mudik Menuju Bukit Coku Kucapi Dusun Tapian Nambar Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	Desa Talawi Mudik, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Dikembalikan	Sudah divalidasi oleh setwan
653	26-03-2024	LELIARNI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	drainase	dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)			DAN PERTANAHAN	AN DAN PERTANAH AN		
654	26-03-2024	LELIARNI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Pembanguna n Jalan Lingkung	dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
660	26-03-2024	SAWAL	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN DRAINASE KAMPUNG BINJAI NAGARI BINJAI KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN	KAMPUNG BINJAI NAGARI BINJAI KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
678	26-03-2024	IMRAL ADENANSI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN DRAINASE NAGARI SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN	NAGARI SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

679	26-03-2024	IMRAL ADENANSI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN DRAINASE NAGARI SAGO SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN	NAGARI SAGO SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
680	26-03-2024	IMRAL ADENANSI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN DRAINASE NAGARI GURUN PANJANG INDUK KEC. BAYANG KAB. PESISIR SELATAN	NAGARI GURUN PANJANG INDUK KEC. BAYANG KAB. PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
699	27-03-2024	HIDAYAT	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	BETONISASI JALAN PERMUNGKIMAN	KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
700	27-03-2024	HIDAYAT	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	DREINASE JALAN PERMUKIMAN	KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)				AN		
707	27-03-2024	YUNISRA SYAHIRAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	BETONISASI JALAN PERMUKIMA N	PASAMAN BARAT, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
708	27-03-2024	YUNISRA SYAHIRAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	BANTUAN DREINASE PERUMAHAN	PASAMAN BARAT, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
712	27-03-2024	IRWAN AFRIADI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Rebat Beton Jalan Lingkungan Permukiman di Kota Padang 11 Paket	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

713	27-03-2024	IRWAN AFRIADI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Irigasi Lingkungan Permukiman di Kota Padang 11 Paket	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
796	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN RW 1 KEL. LAMBUNG BUKIK KEC. PAUH KOTA PADANG	RW 1 KEL. LAMBUNG BUKIK KEC. PAUH KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
797	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SUNGAI LAREH	SUNGAI LAREH, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

798	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG SIMPANG EMPAT KEL. AIR PACAH KOTO TANGAH KOTA PADANG	SIMPANG EMPAT KEL. AIR PACAH KOTO TANGAH KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
799	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG RW.3 PS. AMBACAN KOTA PADANG	RW.3 PS. AMBACAN KOTA PADANG , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
800	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG DAN DRAINASE SIKAYAN RW.7 KEL. BALAIGADANG	SIKAYAN RW.7 KEL. BALAIGADANG , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
801	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG RW.9 KELURAHAN PASAR AMBACANG	RW.9 KELURAHAN PASAR AMBACANG , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)				AN		
802	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN DAN DRAINASE RW.7 DURITA ASRI KEL. PS. AMBACANG	RW.7 DURITA ASRI KEL. PS. AMBACANG , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
803	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG RW 4 KEL. KURANJI KOTA PADANG	RW 4 KEL. KURANJI KOTA PADANG , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
807	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG KUBU DURIAN	KUBU DURIAN , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

809	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG RW. 13 GUNUNG SARIK	RW. 13 GUNUNG SARIK, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
810	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG RW 2. PS. AMBACANG	RW 2. PS. AMBACANG, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
812	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENGASPALAN JALAN RIMBO TAROK RW.11 KEL. GUNUNG SARIK	RIMBO TAROK RW.11 KEL. GUNUNG SARIK, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
816	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	PEMBANGUN AN JALAN LOLO KASIK RW.1 KEL. GUNUNG SARIK	LOLO KASIK RW.1 KEL. GUNUNG SARIK , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)				AN		
821	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG AIR DINGIN	AIR DINGIN, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
826	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN JALAN LINGKUNG KAPALO KOTO	KAPALO KOTO , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
828	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN DRAINASE RW 11 KEL. PADANG SARAI	RW 11 KEL. PADANG SARAI, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

829	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN DRAINASE RW.4 KAMPUNG OLO	RW.4 KAMPUNG OLO , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
831	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUN AN DRAINASE SIMPANG EMPAT KEL. AIR PACAH KOTA PADANG	SIMPANG EMPAT KEL. AIR PACAH KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
833	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEBANGUNA N DRAINASE KOMPLEK BERLINDO RW.6 KEL. SUNGAI SAPIH	KOMPLEK BERLINDO RW.6 KEL. SUNGAI SAPIH, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
893	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk	PEMBANGUN AN DRAINASE KAMPUNG DALAM	KAMPUNG DALAM , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)			PERTANAHAN	PERTANAHAN		
895	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN DRAINASE KAMPUNG DALAM	SUNGAI LAREH, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
897	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN DRAINASE RT.3RW4 KEL. ANDURUNG KEC. KURANJI	RT.3RW4 KEL. ANDURUNG KEC. KURANJI, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
899	27-03-2024	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBANGUNAN MCK MESJID QUBA KEL. LAMBUNG BUKIK KEC. PAUH KOTA PADANG	KEL. LAMBUNG BUKIK KEC. PAUH KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

908	27-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN LINGKUNG DESA BANJARRONAH	BANJARRONAH PANGKALAN, KAB. LIMA PULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	sudah di validasi oleh setwan
915	27-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN LINGKUNG TRAN-BOMBAY BANJARRONAH	PANGKALAN, KAB. LIMA PULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
920	27-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN DARI BUKIK TALAO - SEI PIMPING, GUNUNG MALINTANG, KAB. 50 KOTA	GUNUNG MALINTANG, Pangkalan Koto Baru, Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
928	27-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	PENINGKATAN JALAN DIKAMPUNG BARU, Kampung Baru Kenagarian Pangkalan,	Kampung Baru Kenagarian Pangkalan, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)	Kab. Lima Puluh Kota			AN		
931	27-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN DARI ROUGE KE PARAK GOTAH	Pangkalan, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
933	27-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN DI DESA KOTO TANGAH, PANGKALAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
935	27-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN DI SIMPANG ROUGE, PANGKALAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

938	27-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN UBUAH TEMBUS KUBURAN, PANGKALAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	KECAMATAN PANGKALAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1009	27-03-2024	ARTATI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	RABAT BETON JALAN PUSARO LAKUANG BATEH KUMAYAN JORONG PUSARO LAKUANG SUNGAI PUAR KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM	JR. PUSARO LAKUANG NAGARI SUNGAI PUAR KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1032	27-03-2024	ARKADIUS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman Surau Tanjuang Jorong Kotopanjang Nagari Sungaitarab Kabupaten Tanah Datar	Jorong Kotopanjang Nagari Sungaitarab Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

1033	27-03-2024	ARKADIUS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman ke SD No, 32 Jorong Kotopanjang Nagari Sungaitarab Kab, Tanah Datar	Nagari Sungaitarab Kab, Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1034	27-03-2024	ARKADIUS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman Ladang Koto Jorong Sungaitarab Nagari Sungaitarab Kabupaten Tanah Datar	Jorong Sungaitarab Nagari Sungaitarab Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1049	28-03-2024	LAZUARDI ERMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBUATAN JALAN LINGKUNG	BALAI BARU JORONG PASA NAGARI TIKU SELATAN, KEC. TANJUNG MUTIARA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

1050	28-03-2024	LAZUARDI ERMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBUATAN JALAN LINGKUNG	BANDA BARU NAGARI TIKU SELATAN, KEC. TANJUNG MUTIARA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1051	28-03-2024	LAZUARDI ERMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PEMBUATAN JALAN LINGKUNG	JORONG GASAN KECIL NAGARI TIKU SELATAN, KEC. TANJUNG MUTIARA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1087	28-03-2024	DASWIPPETRA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN LINGKUNG KOMPLEK PERUMAHAN KAMPUNG BELIBIS KEL.KAMPUNG JAWA KEC. TANJUNG KOTA SOLOK	KEL.KAMPUNG JAWA KEC. TANJUNG KOTA SOLOK, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan
1088	28-03-2024	DASWIPPETRA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	JALAN LINGKUNG PERUMAHAN - GRIYA GURUN BAGAN KOTA SOLOK	KOTA SOLOK, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah dievaluasi oleh Setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)				AN		
1092	28-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN JORONG KABUN NAGARI HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	JORONG KABUN NAGARI HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1093	28-03-2024	DODY DELVY	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN JORONG GUGUAK AMPALU, KECAMATAN GUGUAK, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	JORONG GUGUAK AMPALU, KECAMATAN GUGUAK, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1149	28-03-2024	DESRIO PUTRA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	BBETONISASI JALAN PERMUKIMAN	KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

1150	28-03-2024	DESRIO PUTRA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	BETONIASI PERMUKIMAN	SOLOK, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1151	28-03-2024	DESRIO PUTRA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	DREINASI PERMUKIMAN	KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1218	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN PEMUKIMAN LINGKAR SIMPANG OMPEK CANIAGO	JORONG SIMPANG GODUANG KEANAGARIAN SIMPANG KOPUAK KECAMATAN MUNGKA., Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

1224	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN LINGKUNGAN GAREGEH LAPANGAN BOLA	JORONG KAMPUANG PATAI, NAGARI PANDAM GADANG, KEC GUNUANG OMEH, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1228	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	KELANJUTAN JALAN LINGKUNGAN SAMPING BAKSO SALADINA JORONG PULUTAN	JORONG PULUTAN NAGARI KOTO TUO KEC HARAU, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1229	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN PEMUKIMAN PADANG RAJO NAGARI KOTO TUO	PADANG RAJO NAGARI KOTO TUO KEC HARAU, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

1230	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN PEMUKIMAN KOMLEK BKKBN TANJUNG PATI	TANJUNG PATI NAGARI KOTO TUO, KEC HARAU , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1231	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN PEMUKIMAN SONTUI NAGARI SARILAMAK	NAGARI SARI LAMAK KEC HARAU, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1232	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN PEMUKIMAN MUARO JORONG KETINGGIAN	JORONG KETINGGIAN, NAGARI SARILAMAK, KEC HARAU , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1233	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	JALAN PEMUKIMAN BELAKANG DEPAG NAGARI KOTO TUO	NAGARI KOTO TUO KEC HARAU , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

			Permukiman (RPJMD)				AN		
1236	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN LINGKUNG JORONG KOTO LAMO	JORONG KOTO LAMO NAGARI GUNUNG MALINTANG KEC PANGKALAN , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1237	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN LINGKUNG JORONG TANJUNG MONTI	JAORONG TANJUNG MONTI NAGARI SUNGAI BERINGIN, KEC PAYAKUMBUH , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1241	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	DRAINASE DI JORONG BANJA RANAH NAGARI PANGKALAN	JORONG BANJA RANAH NAGARI PANGKALAN , Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

1243	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN PEMUKIMAN TITIAN KAWEK NAGARI KOTO TUO	NAGARI KOTO TUO KEC HARAU, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1244	29-03-2024	AIDA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	JALAN PEMUKIMAN PADANG RAJO NAGARI KOTO TUO KEC HARAU	PADANG RAJO NAGARI KOTO TUO, KEC HARAU, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan
1248	29-03-2024	ARTATI	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (RPJMD)	PENINGKATAN JALAN PERMUKIMAN SIMPANG AIA TAGANANG	JORONG GUMARANG II TIGO KOTO SILUNGKANG, PALEMBAYAN, KABUPATEN AGAM, Provinsi Sumatera Barat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Verifikasi TAPD	Sudah divalidasi oleh setwan

2.2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Sumbar Tahun 2025-2045

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah Pusat dan Daerah serta kolaborasi antar pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan Perencanaan Pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itulah disusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah daerah dan tahunan daerah.

Dalam penyelarasan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 mengusung visi Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Daerah yang selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Dari sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan tersebut, terdapat 2 sasaran visi dan 13 indikator utama pembangunan yang menjadi tanggung jawab Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Dimana masing-masing indikator tersebut nantinya akan ditetapkan target dan arah kebijakan untuk masing-masing tahapan. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga akan menurunkan target-target dan arah kebijakan tersebut kepada pemerintah Kab/Kota untuk diakomodir dalam RPJPD Kab/Kota Tahun 2025-2045. Adapun target dan Arah Kebijakan yang dituangkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Arah Kebijakan Provinsi Pada Masing-Masing Sasaran Visi

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission				
SV.5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2.Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3.Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4.Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2.Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4.Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			kehidupan yang rendah karbon			
SV.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengendalian, Pemantauan, dan Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	1) Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2) Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan; 3) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, riverfront/waterfront tourism, penyediaan RTH	1) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan;; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan ketahanan lingkungan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Sumatera Barat

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
18.b	Porsi EBT dalam Bauran	Porsi EBT dalam Bauran Energi	51,70	61,27	70,83	80,40	89,96	1. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi 2. Perumusan	1. Akselerasi penyesuaian harga EBT yang kompetitif dan ekonomis. 2.	1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi terbarukan serta	1. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi dalam mengelola energi

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	Energi Primer (%)	Primer (%)						kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan 3. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan 4. Penguatan kelembagaan dan pendanaan	Percepatan substitusi pembangkit EBT terhadap pembangkit fosil 3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri.	akses untuk masyarakat terhadap energi sehingga tercipta kemudahan akses masyarakat memperoleh energi 2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konservasi energy	terbarukan 2. Penggunaan gas dan bahan bakar nabati seperti Bioetanol, Biodiesel dan Bioavtur terus ditingkatkan
23.b	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	64,00	73,77	82,52	91,26	100,00	1. menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan. 2. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana 3. meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan. 4. Meningkatkan bantuan pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. 5. Menyiapkan skema pembangunan public housing (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah. 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan (housing schemes) berbentuk public housing dan social housing di kawasan cepat tumbuh perkotaan dan perdesaan. 3. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan	1. Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan	1. Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								social housing (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulasi dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan. 6. Membangun dan penyempurnaan sistem informasi perumahan	kebijakan subsidi. 4. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan. 5. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah.		
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79,00	80,06	81,11	85,10	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengendalian, Pemantauan, dan Pendayagunaan dan	1) Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2) Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan; 3) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, riverfront/waterfront tourism, penyediaan	1) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan;; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan ketahanan lingkungan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								Pelestarian SDA	RTH		
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	RT dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	18,57	28,57	38,57	50	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat 2. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	1. pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman
42.c. 1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,00	30,83	50,55	70,28	90,00	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2) Peningkatan Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan	1) Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2) Penguatan pengawasan dan	1) Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan	1) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, 2) Penguatan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	(%)							penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan	integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	n koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
42.c.2	-	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29,00	46,66	64,44	82,22	100	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2) Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan	1) Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan	1) Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	1) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, 2) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								pengolahan sampah maupun limbah.	mendukung circular economy pada kawasan perkotaan		wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
43.a.1	Indeks Ketahanan Energi	Konsumsi listrik per kapita	707	1181,25	1562,50	1943,75	2325	1. Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan 2. Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya, energi angin, energi biomassa, energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya untuk percepatan penyediaan listrik. 3. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 4. Meningkatkan	1. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi 2. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu 3. Meningkatkan pengembangan dan pengusaha ketenagalistrikan 4. Meningkatkan keandalan sistem	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing 3. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang	1. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan 2. Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah dan dijual kepada badan usaha penyedia tenaga listrik

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu 5. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 6. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya. 6. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang	dibutuhkan	

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
									dibutuhkan		
43.a. 2	-	Intensitas energi primer	160	152,50	145	137,50	130	1. Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih 2. Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi 3. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan 4. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur pendukung lainnya dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan dengan pendekatan energi terbarukan 5. Rehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air 6. Sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik	1. Memfasilitasi pembangunan wilayah Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur pendukung lainnya dalam bentuk penyediaan lahan maupun insentif fiskal maupun non fiskal lainnya dengan pendekatan energi terbarukan. 2. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi secara berkelanjutan 3. Konservasi wilayah tangkapan air disekitar lokasi sumber air dalam rangka menjaga pasokan air serta mengurangi pendangkalan agar energi air tetap	1. Meningkatkan pengembangan sumber daya, potensi atau cadangan energi dari energi terbarukan 2. Meningkatkan penyediaan energi bagi masyarakat, terutama di daerah belum berkembang, terisolir, terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat 3. Mengalihkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan menggantinya dengan pembangkit	1. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di gedung-gedung pemerintahan sebagai bentuk penggunaan energi hijau. 2. Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi EBT. 3. Sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi. 4. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi melalui kerjasama dengan kementerian terkait

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								maupun media sosial 7. Mengalihkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan menggantinya dengan pembangkit listrik EBT	terjaga 4. Rehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air 5. Mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik	listrik EBT 4. Mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik 5. Sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik maupun media sosial	dan badan usaha melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi aparatur terkait. 5. Mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik
43.c.1	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08	2,82	4,55	6,29	8,02	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak,	1) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 2) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai);

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).;	infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai); 4) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	3) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
43.c.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	41,23	55,92	70,62	85,31	100,00	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayah. 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air MInum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air MInum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air MInum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air MInum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
										berkelanjutan	
44.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	170,51	164,19 - 157,87	157,86 - 151,54	151,53 - 145,21	145,20-123,49	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan resiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan. 2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas. 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana. 2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas. 3. Mengelola sumberdaya alam kawasan DAS dan pesisir pantai secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju. 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah. 3. Mengelola manfaat sumberdaya alam kawasan DAS dan pesisir pantai sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								3. Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang 4. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana.	dan kekeringan di kawasan DAS dan pesisir pantai dalam jangka panjang 4. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana		
45.a	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	18,08	22,54	27,00	31,45	35,91	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT,	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								transportasi elektifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3.Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4.Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	daerah, 4.Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	peningkatan produktivitas dan efisiensi;	
45.b	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	28,05	36,62	45,18	53,75	62,31	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2.Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2.Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**

Kode.	Indikator Utama Nasional	Indikator Utama Provinsi	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT					ARAH KEBIJAKAN			
			2025	2030	2035	2040	2045	TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
								perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3.Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4.Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	konsisten di berbagai daerah, 4.Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka memastikan target dan arah kebijakan ini dapat diakomodir oleh Pemerintah Kab/Kota dalam RPJPD Kab/Kota tahun 2025-2045, Bappeda Prov. Sumatera Barat melaksanakan musrenbang RPJPD Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Dimana kegiatan musrenbang ini ditindaklanjuti dengan Desk bersama Pemerintah Kab/Kota. Pelaksanaan Desk Musrenbang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 26 April 2024 di Ruang Rapat Bappeda Prov. Sumatera Barat yang dibagi menjadi tiga desk, yaitu Desk Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Desk Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Desk Bidang Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Kegiatan Desk Musrenbang diikuti oleh Perwakilan Bank Indonesia, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Lembaga Profesi, Organisasi Masyarakat, LSM serta seluruh Pemerintah Kab/ Kota di Sumatera Barat, SKPD Provinsi teknis terkait. Pembahasan pada Desk Musrenbang RPJPD Provinsi Sumatera Barat di fokuskan pada:

- ✓ Arah kebijakan dan target sasaran pokok pada Rancangan RPJPD Prov. Sumatera Barat 2025-2045
- ✓ Arah kebijakan dan target sasaran pokok pada Rancangan RPJPD Kabupaten / Kota Tahun 2025-2045
- ✓ Tanggapan dan saran dari seluruh peserta desk musrenbang RPJPD terhadap arah kebijakan dan target sasaran pokok pada Rancangan RPJPD Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2025-2045

Kab. Agam



Kab. Pasaman



Kab. Pasaman Barat



Kab. Solok Selatan



Kab. Dharmasraya

Kab. Kep. Mentawai

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN TAHUN 2024**



Kab. Padang Pariaman



Kab. Sijunjung



Kota Padang Panjang



Kota Pariaman



Kota Sawahlunto



Kota Solok



Kab. Lima Puluh Kota



Kab. Pesisir Selatan



Kab. Solok



Kota Padang



Kab. Tanah Datar



Kota Bukittinggi



Kota Payakumbuh



2.3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang sedang dilaksanakan merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2024 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPD Tahun 2024 yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2024 dilakukan dengan alasan:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah

Berdasarkan capaian tahun 2023 serta memperhatikan capaian perkembangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024, maka terdapat beberapa target yang telah tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Hal ini untuk menjaga optimisme pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas hasil pembangunan.

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

Beberapa indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun berjalan yakni tahun 2024 telah dirilis dengan kondisi Triwulan I oleh BPS antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran. Sehingga berdasarkan capaian tahun berjalan tersebut akan merubah asumsi target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.

3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah

Antara lain yakni capaian SILPA Tahun 2023 dan Pendapatan Asli Daerah yang di proyeksikan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD 2024, selain itu juga terkait dengan meningkatnya kebutuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib yang belum dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2024 serta adanya kebutuhan mendesak yang merupakan prioritas nasional salah satunya adalah pengalokasikan DAU yang telah ditentukan penggunaannya serta adanya *mapping* sub kegiatan untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 Triwulan II terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun serta terdapat beberapa sub kegiatan yang juga dengan capaian yang sangat tinggi dan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai sama sekali karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2024. Terhadap hal tersebut maka perlu disesuaikan kembali asumsi rencana yang telah disusun agar pada akhir tahun seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan efektif serta efisien.

Selain itu, terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat yang pada APBD 2024 belum dianggarkan secara maksimal 12 bulan, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian anggaran antar sub kegiatan kembali.

5. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 bahwa terdapat selisih SILPA dari yang diproyeksikan pada APBD 2023, sehingga terhadap hal ini perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD 2024.

Pada APBD Tahun 2024, diproyeksikan SILPA Tahun 2023 yang dapat digunakan pada tahun 2024 sebesar Rp. 251.444.175.049, namun berdasarkan hasil audit BPK

RI, SILPA Tahun Anggaran 2023 hanya sebesar Rp. 180.447.544.425, sehingga terdapat selisih defisit sebesar Rp. 70.996.630.624 mengingat SILPA yang didapatkan lebih kecil dari proyeksi APBD 2024 maka tentunya akan terjadi rasionalisasi dan penyesuaian belanja, hal ini guna meminimalkan serta menghindari kemungkinan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang gagal bayar dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah.

6. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setelah penetapan RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat dan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2024 ditetapkan, yang keluar dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada terjadinya perubahan asumsi rencana pelaksanaan kegiatan dan keuangan daerah, antara lain yakni :

- a. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024, maka untuk penganggaran yang bersumber Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran belanja dan sumber dana melalui pergeseran anggaran berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- b. Bahwa adanya kejadian bencana alam di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat antara lain erupsi Gunung Merapi, bencana banjir, galodo dan longsor menjelang akhir tahun 2023 dan sampai kondisi bulan Juni 2024 yang menyebabkan beberapa infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi serta Tempat Pembuangan Sampah Akhir mengalami kerusakan yang berdampak kepada keselamatan, kesehatan, keamanan dan perekonomian masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
- c. Adanya penyesuaian anggaran sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF
- d. Terdapat penyesuaian penganggaran terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan usulan pergeseran anggaran sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor 904.1.2.4/70a/APKD/BPKAD/2024 tentang Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2024.
- f. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor: 900.1/1819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024, serta Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, adanya ditemui saldo rekening minus, ketidaksesuaian anggaran kas, kekeliruan pemilihan spesifikasi barang, ketidak sesuaian pencantuman sumber dana dan permasalahan lain-lain yang menyebabkan adanya penyesuaian dan pergeseran rekening belanja

Sehingga arah kebijakan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2024.
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 oleh BPK.
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2024 seperti Silpa yang bersifat *earmark*.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan basca bencana yang terjadi di Sumatera Barat terutama pada perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana infrastruktur.
6. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2024

Adapun penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 bertujuan sebagai berikut:

1. Penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
2. Pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2024.
3. Pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
4. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
5. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat secara garis besar bisa optimal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan target awal yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2024 dapat dilaksanakan sampai akhir tahun dengan melakukan penyesuaian pada indikator target kegiatan.

Kebijakan dan strategi pembangunan lingkup kewilayahan dituangkan dalam dokumen perencanaan nasional dan harus diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah untuk menunjukkan keselarasan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara kegiatan pusat dan daerah, baik dari sisi fungsi, besaran, waktu, maupun lokasi.

Koordinasi perencanaan pembangunan dapat tercapai dengan baik dan terarah perlu dilakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan antar OPD dan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang bersifat imperatif menyebabkan daerah kurang memiliki keleluasaan dalam menetapkan indikator dan target pembangunan.

3.2 Saran

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024 ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk perbaikan kegiatan di tahun berikutnya diantaranya yaitu :

- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota perlu berkoordinasi dalam mengidentifikasi arah pengembangan wilayah masing-masing Kab/Kota dengan memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah dari masing-masing Kab/Kota;
- b. Perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas antara rencana percepatan pembangunan lingkup kewilayahan Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Pusat, provinsi tetangga, dan rencana pembangunan sektoral lainnya.
- c. Perlu peningkatan komitmen, kerjasama, dan koordinasi dari semua stakeholders untuk percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat;
- d. Untuk mengantisipasi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, perlu dicari alternatif pembiayaan selain APBD provinsi dan kabupaten/kota, dengan meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat dalam percepatan pembangunan lingkup kewilayahan.